

EFEKTIVITAS PSAK 69 DALAM PENGELOLAAN ASET BIOLOGIS DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Serly Novianti¹; Aljufri²; Zaharman³

FEB Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581
E-mail : serly@unilak.ac.id (Koresponding)

Abstract: PSAK 69 concerning Agriculture was introduced in Indonesia to improve the transparency and relevance of biological asset reporting through fair value measurement less costs to sell. This study aims to analyze the effectiveness of PSAK 69 implementation in managing biological assets in Indonesian plantation companies in 2024. A descriptive qualitative approach was employed by analyzing annual financial statements and accounting disclosures from five plantation companies. The findings indicate that all companies had implemented PSAK 69 by separating biological assets from fixed assets. However, implementation effectiveness varied, particularly in measurement and disclosure practices. Although 80% of companies applied fair value measurement, most failed to disclose valuation assumptions and methods comprehensively. These inconsistencies resulted in differences in asset valuation and fluctuations in net income. Overall, PSAK 69 has improved the relevance and comparability of financial statements, but greater transparency, stronger human resource competencies, and improved audit supervision remain necessary.

Keywords: PSAK 69, Biological Assets, Fair Value, Plantation Companies, Implementation Effectiveness

Riau tidak dapat disangkal menempati posisi yang signifikan dan sangat diperlukan dalam arsitektur provinsi Indonesia, terutama ketika mengakui kontribusinya yang cukup besar terhadap sektor perkebunan, yang berfungsi sebagai pilar penting tidak hanya memperkuat ekonomi regional tetapi juga memperkuat kerangka ekonomi nasional yang luas yang menopang mata pencaharian penduduk yang besar. Data yang dikumpulkan secara teliti dan komprehensif dari Badan Pusat Statistik (BPS) semakin menjelaskan bahwa sektor perkebunan beroperasi sebagai komponen vital. Pentingnya sektor pertanian dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sangat penting, karena menggarisbawahi peran penting yang dipenuhi sektor ini dalam kerangka ekonomi yang rumit dan heterogen di wilayah tersebut, yang ditandai oleh segudang industri dan kegiatan ekonomi yang secara kolektif menentukan lanskap fiskalnya.

Pemberlakuan Pertanian PSAK 69 pada tahun 2018 menunjukkan perkembangan penting dalam domain

akuntansi, karena menetapkan kerangka kerja yang lebih relevan dan sesuai secara kontekstual untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan menyeluruh aset biologis khusus dalam sektor pertanian, sehingga menangani dan mengakomodasi tuntutan industri yang dinamis dan berkembang dalam konteks yang lebih luas.

Kondisi sosial ekonomi yang berlaku di Riau tidak dapat disangkal memerlukan penelitian ekstensif dan metodis untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PSAK 69, terutama mengingat peran penting provinsi dalam kerangka menyeluruh produksi minyak sawit nasional, yang secara fundamental penting untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan lintasan pertumbuhan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 69 dalam konteks Riau, Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kemandirian operasional dan posisi kompetitif dalam sektor keuangan. Ini menggarisbawahi pentingnya pelaporan menyeluruh, data

arsip, ketajaman akuntansi profesional, dan transparansi dalam bidang pengungkapan keuangan. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya transformasi cepat dan peningkatan transparansi dalam metodologi pelaporan keuangan, khususnya di Riau.

Konsekuensi ekonomi dari industri kayu di Provinsi Riau melambangkan pentingnya produk kayu di hamparan selatan Indonesia. Agregat lahan yang dialokasikan untuk produksi kayu telah diperluas sebesar 2,83 hektar, merupakan 18% dari lahan nasional yang ditujukan untuk produksi kayu. Provinsi ini menyumbang 31% dari total produksi kayu di semua provinsi, menggarisbawahi kritik yang signifikan dan pengaruh strategisnya dalam sektor kayu. Sektor ini tidak hanya merupakan komponen penting dari kerangka ekonomi lokal tetapi juga memberikan dampak yang cukup besar pada Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Riau, yang mencapai 15,45% pada tahun 2021.

Penelitian yang meneliti konsekuensi pengelolaan limbah pada beragam sektor dan kesimpulan penting untuk perusahaan yang berfungsi di Provinsi Riau, termasuk penilaian komprehensif biaya pengelolaan limbah (TBS) yang terkait dengan evolusi sektor pengelolaan limbah, yang menjelaskan bahwa pasar yang berlaku untuk pengelolaan limbah ditandai dengan transparansi minimal dan biaya tinggi. Investigasi juga memastikan bahwa pada tahun 2022, pengeluaran terkait pengeluaran pengelolaan limbah telah meningkat secara signifikan, dari Rp 16.000 per kilogram menjadi Rp 8.000 per kilogram. Perubahan ini dipengaruhi oleh dedikasi organisasi untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah, sesuai dengan standar akuntansi PSAK 69. Penelitian ini menggarisbawahi kekritisannya metodologi historis dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan pengelolaan limbah di Riau.

Survei ekstensif pemerintah Indonesia yang dilakukan di wilayah Sumatera pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa lebih dari 50% instansi pemerintah di

Riau belum melaksanakan pendidikan lingkungan menurut PSAK 69. Kurangnya panduan yang jelas dalam pendidikan dan manajemen sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memberikan laporan keuangan yang akurat, terutama deskripsi kuantitatif dan kualitatif yang terkait dengan aspek biologis. Hal ini menyoroti perlunya inisiatif pendidikan yang lebih efektif dalam domain pelaporan keuangan yang penting. Studi ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan dan kesadaran lingkungan bagi perusahaan yang beroperasi di sektor ini, memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang lebih transparan, tepat waktu, dan komprehensif tentang aspek biologis yang terkait dengan masalah lingkungan, sehingga meningkatkan pemahaman tentang masalah lingkungan dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Meningkatnya minat investor pada perusahaan yang berlokasi di Riau, terutama yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam transparansi pengungkapan keuangan mereka dan kecanggihan metodologi pelaporan mereka. Laporan komprehensif yang dirilis oleh BEI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di antara 12 perusahaan agribisnis yang berlokasi di Riau, hanya enam yang telah mencapai kepatuhan dengan standar minimum yang digambarkan oleh PSAK 69, yang berperan penting dalam membangun kerangka kerja yang kuat untuk regulasi ekonomi kontemporer. Kejadian ini secara efektif mempromosikan pemahaman yang lebih dalam dan penerapan PSAK 69 dalam konteks pengelolaan hama biologis dalam agribisnis yang beroperasi di Riau, sehingga meningkatkan proses pengambilan keputusan, memperkuat kepercayaan investor, dan pada akhirnya menghasilkan kontribusi yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,

yang sangat penting untuk integritas ekologis dan mata pencaharian yang terkait dengan industri dan lingkungan sekitarnya.

Aset Biologis

Penerapan praktik pengelolaan biologis yang efektif dalam ranah perusahaan bisnis yang beroperasi di Indonesia, dan lebih khusus lagi di provinsi Riau, sangat penting, karena memastikan bahwa metodologi operasional yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini selaras dengan peraturan akuntansi yang mengatur kegiatan perusahaan dan pelaporan keuangan mereka. Pentingnya PSAK 69, yang merupakan komponen penting dari Standar Akuntansi No. 69, tidak dapat cukup ditekankan, karena menggarisbawahi perlunya manajemen biologis untuk mencakup beragam konsep bisnis yang harus dilaksanakan dengan cermat dan didokumentasikan secara akurat dalam kepatuhan yang ketat terhadap prinsip dan standar akuntansi yang ditetapkan. Mengingat hal ini, analisis menyeluruh dan ketat dari kumpulan literatur yang ada yang berkaitan dengan kemandirian PSAK 69 dalam domain pengelolaan biologis akan dilakukan, dengan fokus khusus untuk menjelaskan pentingnya kritisnya dan implikasi luas yang dimilikinya bagi perusahaan bisnis yang beroperasi dalam sektor khusus ini.

Investigasi ini tidak hanya akan menyoroti relevansi kepatuhan pada PSAK 69 tetapi juga akan menyelidiki kompleksitas dan nuansa yang terkait dengan penerapannya dalam skenario bisnis dunia nyata, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang perannya dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, upaya ilmiah ini bertujuan untuk berkontribusi pada wacana yang lebih luas seputar standar akuntansi dan dampaknya terhadap manajemen biologi dalam konteks Indonesia, terutama mengingat tantangan dan peluang unik yang ada di Riau. Dengan demikian, temuan dan wawasan yang diperoleh dari analisis ini akan berfungsi

untuk menginformasikan perspektif akademis dan praktis tentang integrasi prinsip-prinsip manajemen biologis sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku.

1. Penunjukan aset biologis, sebagaimana diartikulasikan dalam kerangka komprehensif standar akuntansi, berkaitan dengan aset yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk nyata dari flora hidup, fauna, atau produk yang berasal dari berbagai organisme hidup lainnya, yang semuanya dimiliki oleh entitas dengan tujuan eksplisit baik produksi atau penjualan komersial. Ketentuan yang digambarkan dalam ketentuan PSAK 69 dibuat dengan cermat untuk mengatur proses pengenalan, pengukuran, dan metodologi pelaporan yang berkaitan dengan aset biologis serta produk pertanian yang berasal darinya, sehingga membentuk kerangka kerja sistematis yang membantu perusahaan dalam pengakuan dan evaluasi yang tepat dari nilai wajar yang terkait dengan aset biologis tersebut.

Kerangka evaluatif yang digunakan oleh PSAK 69 pada dasarnya berakar pada paradigma nilai wajar untuk penilaian aset biologis, yang berfungsi sebagai karakteristik pembeda yang membedakan pengelolaan aset biologis dari praktik yang lebih konvensional yang terkait dengan manajemen aset tetap. Metodologi khusus ini menekankan perlunya terpenting untuk mengakui fluktuasi nilai wajar aset biologis yang mungkin timbul dari sejumlah faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dinamika pertumbuhan, variasi hasil, atau penurunan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang diproduksi.

2. Untuk perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Riau, yang sebagian besar terlibat dalam budidaya tanaman yang signifikan secara ekonomi seperti kelapa sawit dan karet, sangat penting untuk menjamin

bahwa praktik pengelolaan yang berkaitan dengan aset biologis, termasuk tetapi tidak terbatas pada pohon palem dan perkebunan karet, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diartikulasikan dalam PSAK 69. Sangat penting bahwa aset biologis ini dinilai pada nilai wajarnya, setelah pengurangan biaya apa pun yang mungkin terkait dengan penjualan aset ini, yang memerlukan evaluasi komprehensif dari harga jual yang diproyeksikan di samping biaya yang dikeluarkan selama seluruh durasi pemeliharaan aset-aset ini sepanjang masa produktif mereka.

Di antara segudang tantangan yang dihadapi perusahaan perkebunan di Riau ketika berusaha menerapkan ketentuan PSAK 69 secara efektif adalah seluk-beluk yang melekat dalam melakukan penilaian nilai wajar, karena upaya untuk memastikan nilai wajar tanaman kelapa sawit atau karet sering terhambat oleh faktor-faktor penentu eksternal seperti fluktuasi harga pasar, kondisi iklim yang merugikan, dan variabilitas hasil pertanian yang dapat terwujud dari waktu ke waktu. Selain itu, kurangnya standar atau pedoman praktis yang didefinisikan dengan jelas sering mengakibatkan perusahaan menghadapi kesulitan besar dalam menentukan metodologi penilaian yang tepat yang diperlukan untuk memastikan evaluasi yang adil dari tanaman yang saat ini sedang dibudidayakan atau yang secara aktif menghasilkan produk.

Selain itu, meningkatnya biaya administrasi dan kompleksitas yang terkait dengan penerapan teknik pengukuran nilai wajar, sebagaimana ditentukan oleh PSAK 69, memerlukan proses pencatatan yang lebih rumit dan ketat, disertai dengan upaya audit yang ditingkatkan, yang dapat secara signifikan memperkuat beban administrasi yang dipaksa untuk dikelola oleh perusahaan perkebunan.

3. Efektivitas PSAK 69 dalam Pengelolaan Aset Biologis

Evaluasi kemanjuran PSAK 69 dalam konteks spesifik manajemen aset biologis sebagaimana diterapkan dalam operasi perusahaan perkebunan dapat dianalisis secara sistematis melalui lensa multifaset yang mencakup beberapa dimensi kritis:

- 1) Keakuratan laporan keuangan merupakan aspek terpenting yang perlu dipertimbangkan; implementasi PSAK 69 memiliki kapasitas untuk secara signifikan meningkatkan perumusan dan penyajian laporan keuangan, yang ditandai dengan peningkatan transparansi dan ketepatan. Peningkatan ini sangat menonjol dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaporan varians yang berkaitan dengan nilai wajar aset biologis, yang seringkali dapat menjadi kompleks dan tunduk pada fluktuasi. Dengan terlibat dalam penilaian yang cermat terhadap nilai wajar yang diberikan pada aset biologis mereka, perusahaan diberi kesempatan untuk menyajikan penggambaran yang lebih otentik dan tepat tentang vitalitas operasional dan kondisi keuangan mereka secara keseluruhan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Kepatuhan terhadap standar internasional merupakan faktor penting lainnya, karena kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dikemas dalam PSAK 69 memberdayakan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kredibilitas dan keunggulan kompetitif mereka dalam pasar global yang semakin saling berhubungan. Kepatuhan ini tidak hanya berfungsi untuk menerangi komitmen organisasi terhadap praktik teladan dalam akuntansi

dan pengelolaan aset biologis tetapi juga menimbulkan rasa kepercayaan dan keandalan di antara para pemangku kepentingan dan investor yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas.

Dalam bidang keberlanjutan perusahaan, secara luas diantisipasi bahwa implementasi strategis dan sistematis PSAK 69 akan mengambil peran penting dalam tidak hanya meningkatkan keberlanjutan operasional jangka panjang perusahaan perkebunan tetapi juga dalam membina pendekatan komprehensif terhadap strategi manajemen yang efektif yang berkaitan dengan manajemen aset biologis yang bernuansa. Pendekatan multifaset ini tidak hanya memfasilitasi optimalisasi hasil pertanian tetapi juga memainkan peran penting dalam memelihara pengembangan lintasan pertumbuhan berkelanjutan, yang, pada gilirannya, penting untuk keberhasilan berkelanjutan dan kelangsungan hidup organisasi yang beroperasi dalam lanskap pasar yang semakin kompetitif dan dinamis.

Penelitian empiris yang telah dilakukan dalam konteks Indonesia telah menjelaskan bahwa sejumlah besar studi menunjukkan bahwa, terlepas dari niat terpuji yang mendasari pengenalan dan penegakan PSAK 69 - yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi praktik pelaporan keuangan - masih ada banyak hambatan praktis yang berfungsi untuk menghambat implementasi yang efektif di tingkat operasional fundamental. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sharifuddin (2021) memberikan penjelasan komprehensif bahwa perusahaan perkebunan yang lebih besar biasanya menghadapi transisi yang relatif lebih lancar terkait adopsi PSAK 69, sebuah fenomena yang sebagian besar dapat dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia unggul mereka yang dikombinasikan dengan infrastruktur teknologi canggih yang memfasilitasi transisi tersebut.

Sebaliknya, perusahaan kecil mendapati diri mereka bergulat dengan

hambatan parah yang secara kritis merusak kapasitas mereka untuk merangkul dan menerapkan standar yang disebutkan di atas secara memadai, sehingga mengurangi potensi mereka untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Selain itu, sementara PSAK 69 menggambarkan pedoman penting yang mengatur pengelolaan aset biologis dalam kerangka operasional perusahaan perkebunan, keberhasilan aktualisasi pedoman ini bergantung secara signifikan pada kapasitas inheren organisasi untuk menerapkan standar ini dengan tingkat presisi yang tinggi dan ketekunan yang tak tergoyahkan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam konteks rumit ini terutama berkisar pada evaluasi akurat nilai wajar aset biologis, yang selanjutnya diperparah oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan metodologi pengumpulan data serta pembentukan kerangka pelaporan yang kuat dan komprehensif yang mampu merangkul kompleksitas yang secara inheren terkait dengan aset ini. Akibatnya, menjadi semakin jelas bahwa upaya kolaboratif dari beragam pemangku kepentingan - yang meliputi perusahaan itu sendiri, badan pengatur, dan profesional akuntansi - mutlak penting untuk memastikan bahwa PSAK 69 melampaui landasan teoretisnya dan berkembang menjadi instrumen praktis yang dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam paradigma operasional sektor perkebunan.

Upaya kolaboratif ini sangat penting di daerah seperti Riau, di mana tantangan yang terkait dengan penerapan standar ini mungkin sangat jelas dan memerlukan upaya bersama untuk navigasi yang sukses. Akibatnya, upaya untuk mencapai keadaan keberlanjutan operasional dalam sektor perkebunan dicirikan oleh segudang hambatan dan kemungkinan, yang mengharuskan penerapan strategi komprehensif dan beragam yang secara efektif mengatasi praktik manajemen dan kompleksitas kepatuhan terhadap peraturan dalam

lanskap lingkungan dan ekonomi yang semakin menuntut.

METODE

Objek penelitian ini adalah praktik manajemen keuangan pada perusahaan perkebunan yang beroperasi di Provinsi Riau, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pengelolaan kelapa sawit. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan perkebunan di sektor pertanian yang berada di wilayah Riau. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, yaitu dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai unit analisis. Penggunaan metode sensus dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan manajemen keuangan, khususnya dalam pengelolaan aset biologis berdasarkan PSAK 69. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan kondisi seluruh populasi secara lebih akurat sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL

Pada penelitian ini diteliti lima perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerapkan PSAK 69 untuk penyajian aset biologis tahun 2024.

Dari analisis laporan keuangan dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan masing-perusahaan tahun 2024, diperoleh gambaran ringkas sebagai berikut:

1. Semua perusahaan telah mengakui aset biologis sesuai dengan ruang lingkup PSAK 69 (miproduk agrikultur pada titik panen)
2. Variasi dalam metode pengukuran dan pengungkapan asumsi valuasi antar perusahaan
3. Terdapat perbedaan dalam tingkat transparansi dan kedalaman pengungkapan metode nilai wajar, asumsi diskonto, serta perubahan nilai wajar aset biologis

Hasil Analisis Berdasarkan Indikator Efektivitas. Berikut hasil berdasarkan keempat indikator yang telah ditetapkan (Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan).

Pengakuan

1. Dari kelima perusahaan, 100% mengakui aset biologis secara eksplisit dan memisahkan dari aset tetap atau persediaan.
2. Sebagian besar mencatat aset biologis sejak tanaman belum menghasilkan atau sejak produk agrikultur pada titik panen sebagai aset biologis.

Pengukuran

1. Sekitar 80% dari perusahaan sampel menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (fair value less cost to sell) dalam pengukuran aset biologis, sesuai dengan PSAK 69.
2. Namun, hanya 60% yang secara eksplisit mengungkapkan metoda valuasi (misalnya DCF, market comparable) dan asumsi seperti tingkat diskonto, harga komoditas, kuantitas produksi.
3. Sisanya memilih pengukuran dengan biaya perolehan atau tidak mengungkapkan secara rinci alasannya, terutama untuk tanaman belum menghasilkan atau aset biologis yang sulit diukur secara andal.

Penyajian

1. Semua perusahaan menyajikan aset biologis secara terpisah dari aset tetap dalam posisi keuangan atau setidaknya memisahkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Beberapa perusahaan menambahkan catatan khusus yang menjelaskan klasifikasi aset biologis, sedangkan lainnya hanya menyajikan angka tanpa penjelasan rinci.

Pengungkapan

1. Sekitar 60% perusahaan mengungkapkan asumsi penilaian (misalnya tingkat diskonto, harga

komoditas, kuantitas produksi), perubahan nilai wajar, serta rekonsiliasi jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode.

2. Sisanya mengungkapkan minimal, atau hanya menyebut bahwa aset biologis diukur pada nilai wajar tanpa rincian asumsi.

Beberapa perusahaan juga belum mengungkapkan komitmen pengembangan aset biologis, atau risiko yang terkait dengan aktivitas agrikultur (misalnya risiko cuaca, serangan hama) secara eksplisit.

PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Biologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan di Riau telah menerapkan PSAK 69 dengan memisahkan aset biologis dari aset tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 69 pada aspek pengakuan telah berjalan cukup efektif karena perusahaan telah memenuhi kriteria pengakuan aset biologis, yaitu adanya pengendalian atas aset, kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomi di masa depan, serta kemampuan untuk mengukur nilai aset secara andal. Namun, masih ditemukan beberapa perusahaan yang mengklasifikasikan tanaman produktif (*bearer plants*) sebagai aset tetap sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Institutional Theory, yang menyatakan bahwa organisasi cenderung mengadopsi standar dan praktik akuntansi untuk memperoleh legitimasi serta meningkatkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku (Suddaby et al., 2017). Dalam konteks ini, penerapan PSAK 69 merupakan bentuk respons perusahaan terhadap tekanan regulatif untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan dapat dibandingkan. Penelitian Elad dan Herbohn (2019) juga menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi sektor agrikultur masih menghadapi tantangan dalam klasifikasi aset biologis, terutama terkait pemisahan antara aset biologis dan tanaman produktif.

Selain itu, Theory of Accounting Harmonization menjelaskan bahwa keseragaman standar akuntansi bertujuan meningkatkan konsistensi pelaporan antarperusahaan sehingga laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Nobes, 2020). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi aset biologis masih diperlukan agar implementasi PSAK 69 dapat berjalan lebih optimal.

Pengukuran Aset Biologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menggunakan nilai wajar (*fair value*) sebagai dasar pengukuran aset biologis. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengadopsi prinsip utama PSAK 69 yang mewajibkan pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*). Namun, masih terdapat perusahaan yang belum mengungkapkan metode penilaian dan asumsi yang digunakan secara rinci, sehingga mengurangi tingkat transparansi dan keterbandingan laporan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Fair Value Accounting Theory, yang menjelaskan bahwa pengukuran berbasis nilai wajar mampu meningkatkan relevansi informasi akuntansi karena mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya pada saat pelaporan (Müller et al., 2018). Akan tetapi, penggunaan nilai wajar juga dapat meningkatkan volatilitas laba karena perubahan nilai aset biologis secara langsung memengaruhi laporan laba rugi.

Penelitian Gonçalves et al. (2022) menunjukkan bahwa pengukuran nilai wajar pada sektor agrikultur dapat meningkatkan relevansi informasi keuangan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan pasar aktif dan transparansi dalam proses penilaian. Sementara itu, Christensen et al. (2021) menjelaskan bahwa kurangnya pengungkapan metode penilaian dapat menurunkan kualitas informasi akuntansi dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor. Oleh karena itu, konsistensi

dalam penerapan metode pengukuran menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas PSAK 69.

Penyajian Aset Biologis

Penyajian aset biologis secara terpisah dalam laporan keuangan merupakan salah satu tujuan utama PSAK 69, yaitu meningkatkan keterbacaan dan keterbandingan informasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menyajikan aset biologis secara terpisah, tetapi kualitas penyajian masih bervariasi. Beberapa perusahaan hanya menyajikan nilai aset tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai kelompok aset, metode penilaian, maupun perubahan nilai wajar.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Decision-Usefulness Theory, yang menegaskan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Scott, 2022). Informasi yang disajikan secara lengkap akan meningkatkan kemampuan investor dan kreditur dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Penelitian De Villiers et al. (2021) juga menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat keterbacaan, transparansi, dan kemampuan pengguna dalam menafsirkan informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyajian aset biologis tidak hanya harus memenuhi ketentuan formal PSAK 69, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan Aset Biologis

Pengungkapan merupakan aspek yang paling menentukan efektivitas penerapan PSAK 69. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai aset biologis, tetapi kualitas pengungkapannya masih belum optimal. Beberapa perusahaan belum menjelaskan metode valuasi, asumsi yang digunakan, kelompok aset biologis, maupun risiko yang berkaitan dengan

aktivitas agrikultur secara rinci.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Stakeholder Theory, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat (Freeman et al., 2021). Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Selain itu, Agency Theory menjelaskan bahwa pengungkapan yang memadai dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, yang dikembangkan kembali oleh Hassan et al., 2022). Penelitian Bamber et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan yang lebih tinggi mampu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi.

Dengan demikian, meskipun PSAK 69 telah diterapkan secara formal pada perusahaan perkebunan di Indonesia, aspek pengungkapan masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Peningkatan kualitas pengungkapan akan memperkuat transparansi, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, dan mengoptimalkan efektivitas penerapan PSAK 69 secara substantif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024, serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan PSAK 69 secara formal telah tercapai, namun belum optimal secara substantif. Seluruh perusahaan sampel telah mengimplementasikan PSAK 69 dalam pengakuan dan penyajian aset biologis secara terpisah dari aset tetap. Namun, masih ditemukan variasi dalam metode

pengukuran nilai wajar serta keterbatasan pengungkapan asumsi valuasi.

2. Aspek pengakuan dan penyajian tergolong efektif. Pengakuan aset biologis telah dilakukan sesuai dengan kriteria PSAK 69, dan penyajian dalam laporan keuangan telah dilakukan secara terpisah dan transparan, sehingga meningkatkan keterbandingan antarperusahaan.
3. Aspek pengukuran masih menghadapi kendala teknis dan konseptual. Sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan *fair value less cost to sell*, namun terdapat perbedaan dalam metode penentuan nilai wajar serta penggunaan asumsi ekonomi seperti harga komoditas, tingkat diskonto, dan estimasi produktivitas tanaman. Hal ini menimbulkan perbedaan hasil valuasi antar perusahaan dan volatilitas laba bersih.
4. Aspek pengungkapan masih belum sepenuhnya transparan. Beberapa perusahaan belum secara lengkap mengungkapkan asumsi dan metode penilaian yang digunakan. Kurangnya keterbukaan dalam pengungkapan menyebabkan pemangku kepentingan sulit menilai reliabilitas nilai wajar yang disajikan.

Secara umum, penerapan PSAK 69 telah meningkatkan relevansi dan transparansi pelaporan keuangan di sektor agrikultur, tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek kompetensi sumber daya manusia, panduan teknis penerapan nilai wajar, dan pengawasan auditor agar penerapannya lebih efektif dan konsisten.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, R. (2021). Dampak Penerapan PSAK 69 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 78-92.
- APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia). (2022). *Data Petani Kelapa Sawit Indonesia 2022*.
- APKASINDO. Retrieved from <https://apkasindo.or.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). *Riau Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Riau. Retrieved from <https://riau.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2021-2022*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2022). *Laporan Kinerja Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di BEI*. Jakarta: BEI.
- Darlis, E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 69 pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(4), 45-60.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2023). *Laporan Tahunan Perkebunan Riau 2023*. Dinas Perkebunan Riau. Retrieved from <https://disbun.riau.go.id>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Karet 2021-2022*. Kementerian Pertanian RI. Retrieved from <http://ditjenbun.pertanian.go.id>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). (2022). *Laporan Industri Kelapa Sawit Indonesia 2022*. GAPKI. Retrieved from <https://gapki.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: KLHK.
- Lunin, D. (2018). *Akuntansi Aset Biologis: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nelly, R. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pelaporan Aset Biologis dalam*

- Perusahaan Perkebunan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 89-102.
- Rahman, M. F. (2020). Pengaruh Penerapan PSAK 69 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123-135.
- Sharifuddin, A. (2021). Implementasi PSAK 69 pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 12(3), 45-60.
- Sekaran, U. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th Edition. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. R. (2019). Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 210-225.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.